

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
NUSA TENGGARA TIMUR**

Untuk Periode yang Berakhir  
Tanggal  
30 Juni 2023

## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kupang, 5 Juli 2023  
Kepala Kantor Wilayah,

Marciana Dominika Jone, S.H  
NIP 196411261991032001

**DAFTAR ISI**  
**TAR ISI**

|   |   |
|---|---|
| Kata Pengantar  | x |
| Daftar Isi  | x |
| Pernyataan Tanggung Jawab                             | x |
| Ringkasan   | x |
| I. Laporan Realisasi Anggaran                         | x |
| II. Neraca  | x |
| III. Laporan Operasional                              | x |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas                         | x |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan                      | x |
| A. Penjelasan Umum                                    | x |
| B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | x |
| C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca                     | x |
| D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional        | x |
| E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas  | x |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya                       | x |
| VI. Lampiran dan Daftar                               | x |



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan : W.J. Lamentik No.98 Kupang Kode Pos : 85111

Laman: <https://ntt.kemenkumham.go.id>, Surel: [ntt.kanwil@gmail.com](mailto:ntt.kanwil@gmail.com)

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 5 Juli 2023  
Kepala Kantor Wilayah,

Marciana Dominika Jone, S.H  
NIP 196411261991032001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp15.424.683**.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar **Rp 9.518.986.577** atau mencapai **41,46** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp22.961.076.000**.

### NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp71.593.966.825** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp110.033.267**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp0**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp71.451.527.123**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp32.406.435**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp749.192.652** dan **Rp70.844.774.173**.

### LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp13.321.617**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp10.194.238.780** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp10.180.917.163**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp3.933.033** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp10.176.984.130**.

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar **Rp71.024.980.264** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp10.176.984.130** ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp0** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp9.996.778.039** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai **Rp70.844.774.173**.

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

| Uraian                             | Cat. | TA 2023               |                      |                                 | %            | TA 2022              |
|------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
|                                    |      | Anggaran              | Realisasi            | Realisasi di Atas<br>(Di Bawah) |              | Realisasi            |
| <b>Pendapatan Negara dan Hibah</b> | B.1  |                       |                      |                                 |              |                      |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak      | B.1  | -                     | 15.424.683           | 15.424.683                      | -            | 7.840.511            |
| <b>Jumlah Pendapatan dan Hibah</b> |      | <b>-</b>              | <b>15.424.683</b>    |                                 | <b>-</b>     | <b>7.840.511</b>     |
| <b>Belanja</b>                     | B.2. |                       |                      |                                 |              |                      |
| Belanja Pegawai                    | B.3  | 9.255.164.000         | 5.572.531.175        | 3.682.632.825                   | 60,21        | 4.791.476.705        |
| Belanja Barang                     | B.4  | 7.277.913.000         | 3.118.647.402        | 4.159.265.598                   | 42,85        | 2.819.586.950        |
| Belanja Modal                      | B.5  | 6.427.999.000         | 827.808.000          | 5.600.191.000                   | 12,88        | 470.736.600          |
| Belanja Bantuan Sosial             | B.6  | -                     | -                    | -                               | -            | -                    |
| <b>Jumlah Belanja</b>              |      | <b>22.961.076.000</b> | <b>9.518.986.577</b> | <b>13.442.089.423</b>           | <b>41,46</b> | <b>8.081.800.255</b> |

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**II. NERACA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT  
NERACA  
PER 30 Juni 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN  | CATATAN    | 2023                  | 2022                  |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ASET</b>   |            |                       |                       |
| <b>ASET LANCAR</b>  | <b>C.1</b> |                       |                       |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                              | C.1.1      | 60.000.000            | -                     |
| Kas di Bendahara Penerimaan                               | C.1.2      | -                     | -                     |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                                | C.1.3      | -                     | -                     |
| Piutang Bukan Pajak                                       | C.1.4      | 1.829.967             | -                     |
| Bagian Lancar Tagihan TP/TGR                              | C.1.5      | -                     | -                     |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                  | C.1.6      | -                     | -                     |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek | C.1.7      | -                     | -                     |
| Beban Dibayar di Muka                                     | C.1.8      | -                     | -                     |
| Pendapatan yang Masih harus Diterima                      | C.1.9      | -                     | -                     |
| Persediaan  | C.1.10     | 48.203.300            | 57.398.600            |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                                 |            | <b>110.033.267</b>    | <b>57.398.600</b>     |
| <b>ASET TETAP</b>   | <b>C.2</b> |                       |                       |
| Tanah   | C.2.1      | 51.308.798.800        | 51.308.798.800        |
| Peralatan dan Mesin                                       | C.2.2      | 12.778.879.833        | 11.334.331.533        |
| Gedung dan Bangunan                                       | C.2.3      | 20.984.419.531        | 20.984.419.531        |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                              | C.2.4      | -                     | -                     |
| Aset Tetap Lainnya  | C.2.5      | 120.656.391           | 109.656.391           |
| Konstruksi dalam pengerjaan                               | C.2.6      | 2.545.926.915         | 2.545.926.915         |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                           | C.2.7      | -16.287.154.347       | -15.349.624.259       |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                                  |            | <b>71.451.527.123</b> | <b>70.933.508.911</b> |
| <b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                             | <b>C.3</b> |                       |                       |
| Tagihan TP/TGR  | C.3.1      | -                     | -                     |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang  | C.3.2      | -                     | -                     |
| Tagihan TP/TGR  | C.3.3      | -                     | -                     |
| <b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                      |            | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                       | <b>C.4</b> |                       |                       |
| Aset Tidak Berwujud                                       | C.4.1      | -                     | -                     |
| Aset Lain-Lain  | C.4.2      | 1.187.116.910         | 1.358.273.149         |
| Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya            | C.4.3      | -1.154.710.475        | -1.324.200.396        |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                                |            | <b>32.406.435</b>     | <b>34.072.753</b>     |
| <b>JUMLAH ASET</b>  |            | <b>71.593.966.825</b> | <b>71.024.980.264</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>  |            |                       |                       |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                            | <b>C.5</b> |                       |                       |
| Uang Muka dari KPPN                                       | C.5.1      | 60.000.000            | -                     |
| Utang kepada Pihak Ketiga                                 | C.5.2      | 647.555.002           | -                     |
| Pendapatan Diterima di Muka                               | C.5.3      | -                     | -                     |
| Beban yang Masih Harus Dibayar                            | C.5.4      | -                     | -                     |
| Utang Yang Belum Ditagihkan                               | C.5.5      | 41.637.650            | -                     |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                     |            | <b>749.192.652</b>    | <b>-</b>              |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                   |            | <b>749.192.652</b>    | <b>-</b>              |
| <b>EKUITAS</b>  |            |                       |                       |
| Ekuitas   | C.7        | 70.844.774.173        | 69.324.431.983        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                     |            | <b>70.844.774.173</b> | <b>69.324.431.983</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                       |            | <b>71.593.966.825</b> | <b>69.324.431.983</b> |

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***



**III. LAPORAN OPERASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN  | Cat  | 2023                    | 2022                    |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL                                  |      |                         |                         |
| PENDAPATAN  |      |                         |                         |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak                         | D.1  | 13.321.617              | 4.186.852               |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                              |      | <b>13.321.617</b>       | <b>4.186.852</b>        |
| BEBAN   |      |                         |                         |
| Beban Pegawai   | D.2  | 6.202.013.177           | 9.674.546.149           |
| Beban Persediaan                                      | D.3  | 82.676.800              | 193.237.650             |
| Beban Barang dan Jasa                                 | D.4  | 1.813.791.952           | 3.376.516.518           |
| Beban Pemeliharaan                                    | D.5  | 302.148.600             | 928.989.715             |
| Beban Perjalanan Dinas                                | D.6  | 1.042.936.000           | 1.318.501.082           |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat       | D.7  | -                       | -                       |
| Beban Bantuan Sosial                                  | D.8  | -                       | -                       |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | D.9  | 750.672.251             | 1.741.946.608           |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                 | D.10 | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                   |      | <b>10.194.238.780</b>   | <b>17.233.737.722</b>   |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>    |      | <b>(10.180.917.163)</b> | <b>(17.229.550.870)</b> |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL                              |      |                         |                         |
| Surplus Penjualan Aset Nonlancar                      |      | 311.999                 | (128.600.000)           |
| Pendapatan pelepasan aset non lancar                  |      | 311.999                 | -                       |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                       |      | -                       | 128.600.000             |
| SURPLUS/DEFISIT dari kegiatan non operasional lainnya |      | 3.621.034               | 37.918.123              |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya      |      | 3.621.034               | 37.918.123              |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya           |      | -                       | -                       |
| <b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | D.11 | <b>3.933.033</b>        | <b>(90.681.877)</b>     |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>         |      | <b>(10.176.984.130)</b> | <b>(17.320.232.747)</b> |
| POS LUAR BIASA  | D.12 |                         |                         |
| Pendapatan Luar Biasa                                 |      | -                       | -                       |
| Beban Luar Biasa                                      |      | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>                          |      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN   | CATATAN | 2023                  | 2022                  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                    | E.1     | 71.024.980.264        | 69.324.431.983        |
| SURPLUS/DEFISIT LO                                     | E.2     | (10.176.984.130)      | (9.574.871.250)       |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI         | E.3     |                       | -                     |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS               |         | -                     | -                     |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                                 | E.4.1   | -                     | -                     |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                               | E.4.2   | -                     | -                     |
| SELISIH REVALUASI ASET                                 | E.4.3   | -                     | -                     |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI                       | E.4.4   | -                     | -                     |
| KOREKSI LAIN-LAIN                                      | E.4.5   | -                     | -                     |
| <b>JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b> |         | -                     | -                     |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                                | E.5     | 9.996.778.039         | 10.558.607.581        |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS                             |         | (180.206.091)         | 983.736.331           |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                   | E.6     | <b>70.844.774.173</b> | <b>70.308.168.314</b> |

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan W. J. Lalamentik No.98, Oebobo, Kupang - NTT.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Demi mewujudkan tujuan diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berkomitmen dengan visi “ Masyarakat Nusa Tenggara Timur memperoleh kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi aparatur hukum dan hak asasi manusia.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi.
3. Menyelenggarakan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.
4. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

*Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis Akuntansi*

#### A.3 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian

Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Perintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*

##### **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan LO*

**(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

*Belanja*

**(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Aset*

**5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian   | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                 | 0,5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan   | 50%        |
| Macet            | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan  | 100%       |

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap          | Masa Manfaat     |
|------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin          | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan          | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5 s.d. 40 tahun  |
| Aset Tetap Lainnya           | 4 tahun          |

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud***

| <b>Kelompok Aset Tetap</b>   | <b>Masa Manfaat</b> |
|--|---------------------|
| Software   | 4 tahun             |
| Franchise  | 5 tahun             |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 tahun            |
| Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim                     | 20 tahun            |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                    | 25 tahun            |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram          | 50 tahun            |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I  | 70 tahun            |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**



Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas  
Pos Laporan  
Realisasi  
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp22.961.076.000**. Selama Periode berjalan terdapat perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) berupa Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

| Uraian                   | Tahun Anggaran 2023   |                         |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                          | Anggaran Awal         | Anggaran Setelah Revisi |
|                          | (dalam Rupiah)        |                         |
| Pendapatan               |                       |                         |
| Pendapatan PNPB          | 0                     | 0                       |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| Belanja                  |                       |                         |
| Belanja Pegawai          | 9.255.164.000         | 9.255.164.000           |
| Belanja Barang           | 7.277.913.000         | 7.277.913.000           |
| Belanja Modal            | 828.608.000           | 6.427.999.000           |
| Belanja Bantuan Sosial   | 0                     | 0                       |
| <b>Jumlah Belanja</b>    | <b>17.361.685.000</b> | <b>22.961.076.000</b>   |

### B.1 Pendapatan

Realisasi  
Pendapatan  
Rp15.424.683

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp15.424.683** atau mencapai **100 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 0**. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

| Uraian  | Tahun Anggaran 2023 |            |     |
|---|---------------------|------------|-----|
|   | Anggaran            | Realisasi  | %   |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0                   | 311.999    | 100 |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan    | 0                   | 11.491.650 | 100 |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL       | 0                   | 3.621.034  | 100 |

Realisasi Pendapatan Pendidikan TA 2023 mengalami Penurunan **196,73 persen** dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya Pendapatan Lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu di Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM NTT. Selain itu, terdapat peningkatan Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha sebesar 150,55 persen yang berasal dari pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa Sewa Rumah Dinas.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022  
(dalam Rupiah)

| Uraian  | Realisasi 2023    | Realisasi 2022   | %             |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 11.803.649        | 7.840.511        | 150,55        |
| Pendapatan Denda  | 0                 | 0                | 0,00          |
| Pendapatan Lain-Lain  | 3.621.034         | 0                | 0,00          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>15.424.683</b> | <b>7.840.511</b> | <b>196,73</b> |

### B.2 Belanja

Realisasi Belanja  
Rp  
Rp9.518.986.577

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT per 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp9.518.986.577** atau **41,46%** dari anggaran belanja sebesar **Rp22.961.076.000**. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023  
(dalam Rupiah)

| Uraian                              | Tahun Anggaran 2023   |                      |              |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                     | Anggaran              | Realisasi            | %            |
| Belanja Pegawai                     | 9.255.164.000         | 5.572.531.175        | 60,21        |
| Belanja Barang                      | 7.277.913.000         | 3.118.647.402        | 42,85        |
| Belanja Modal                       | 6.427.999.000         | 827.808.000          | 12,88        |
| Belanja Bantuan Sosial              | 0                     | 0                    | 0,00         |
| <b>Total Belanja Kotor</b>          | <b>22.961.076.000</b> | <b>9.518.986.577</b> | <b>41,46</b> |
| <b>Pengembalian Belanja Pegawai</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>-</b>     |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>22.961.076.000</b> | <b>9.518.986.577</b> | <b>41,46</b> |

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 mengalami Kenaikan sebesar **17,78 persen** dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Naiknya Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
2. Bertambahnya Jumlah Pegawai pada Kantor Wilayah Kemenkumham NTT karena Mutasi.

Perbandingan Realisasi Belanja  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                 | Realisasi 2023       | Realisasi 2022       | %            |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Pegawai        | 5.572.531.175        | 4.791.476.705        | 16,30        |
| Belanja Barang         | 3.118.647.402        | 2.819.586.950        | 10,61        |
| Belanja Modal          | 827.808.000          | 470.736.600          | 75,85        |
| Belanja Bantuan Sosial | 0                    | 0                    | -            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>9.518.986.577</b> | <b>8.081.800.255</b> | <b>17,78</b> |

### B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai  
Rp5.572.531.175*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp5.572.531.175** dan **Rp4.791.476.705**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar **16,30 persen** dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan penambahan Jumlah Pegawai JFT
- 2.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                              | Realisasi 2023       | Realisasi 2022       | %             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS      | 5.527.352.715        | 4.737.014.695        | 16,68         |
| Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS  | -                    | -                    | 0,00          |
| Belanja Honorarium                  | -                    | -                    | 0,00          |
| Belanja Lembur                      | 45.549.000           | 56.053.000           | -18,74        |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>         | <b>5.572.901.715</b> | <b>4.793.067.695</b> | <b>16,27</b>  |
| <b>Pengembalian Belanja Pegawai</b> | <b>(370.540)</b>     | <b>(1.590.990)</b>   | <b>-76,71</b> |
| <b>Jumlah Belanja</b>               | <b>5.572.531.175</b> | <b>4.791.476.705</b> | <b>16,30</b>  |

Belanja Barang  
Rp3.118.647.402

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp3.118.647.402** dan **Rp2.819.586.950**. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami Kenaikan **10,61%** dari Realisasi Belanja Barang TA ~~2022~~2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Jasa sewa kendaraan.
2. Meningkatnya Anggaran Perjalanan Dinas

#### Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                                      | Realisasi 2023       | Realisasi 2022       | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Barang Operasional                  | 537.745.300          | 686.870.670          | -21,71       |
| Belanja Barang Non Operasional              | 237.765.100          | 253.803.000          | -6,32        |
| Belanja Persediaan                          | 69.743.000           | 70.578.000           | -1,18        |
| Belanja Jasa                                | 944.549.902          | 703.876.530          | 34,19        |
| Belanja Pemeliharaan                        | 303.981.100          | 475.925.500          | -36,13       |
| Belanja Perjalanan Dinas                    | 1.024.863.000        | 628.533.250          | 63,06        |
| Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat | -                    | -                    | 0,00         |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                 | <b>3.118.647.402</b> | <b>2.819.586.950</b> | <b>10,61</b> |
| <b>Pengembalian Belanja Barang</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>  |
| <b>Jumlah Belanja</b>                       | <b>3.118.647.402</b> | <b>2.819.586.950</b> | <b>10,61</b> |

#### B.5 Belanja Modal

Belanja Modal  
Rp827.808.000

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp827.808.000** dan **Rp470.736.600**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar **75,85%** dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh kenaikan anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2023.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                            | Realisasi 2023     | Realisasi 2022     | %            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Belanja Modal Tanah               | -                  | -                  | 0,00         |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 827.808.000        | 426.860.000        | 93,93        |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | -                  | 43.876.600         | -100,00      |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | <b>827.808.000</b> | <b>470.736.600</b> | <b>75,85</b> |
| <b>Pengembalian Belanja Modal</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>     |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>       | <b>827.808.000</b> | <b>470.736.600</b> | <b>75,85</b> |

Belanja Modal Tanah Rp0

### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan Tidak adanya anggaran Belanja Modal Tanah.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Tanah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                            | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | %       |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Belanja Modal Tanah               | -              | -              | #DIV/0! |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | -              | -              | #DIV/0! |
| <b>Pengembalian Belanja Modal</b> | -              | -              | 0,00    |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>       | -              | -              | #DIV/0! |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp426.860.000

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar **Rp827.808.000**, mengalami kenaikan sebesar **93,93 persen** bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar **Rp 426.860.00**. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin berupa Laptop, PC dan Printer sebagai fasilitas pendukung kerja pegawai.

#### Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                            | Realisasi 2023     | Realisasi 2022 | %       |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------|
| PC                                | 508.700.000        | -              | #DIV/0! |
| Laptop                            | 223.415.000        | -              | #DIV/0! |
| Printer                           | 90.000.000         | -              | #DIV/0! |
| Kamera Udara                      |                    |                |         |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | <b>822.115.000</b> | -              | #DIV/0! |
| <b>Pengembalian Belanja Modal</b> | -                  | -              | #DIV/0! |

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 0

### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp 43.876.600**. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami Penurunan sebesar **100 persen** dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal gedung dan bangunan baru

dialokasikan pada bulan Juni 2023 sehingga berdampak belum dapat terealisasinya anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode 30 Juni 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                            | Realisasi 2023 | Realisasi 2022    | %              |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Renovasi Gedung Kantor            | -              | 43.876.600        | -100,00        |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | -              | <b>43.876.600</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Pengembalian Belanja Modal</b> | -              | -                 | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>       | -              | <b>43.876.600</b> | <b>-100,00</b> |

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp 0*

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan Tidak adanya anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                            | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | %              |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Belanja Modal Jaringan            | -              | -              | #DIV/0!        |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | -              | -              | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Pengembalian Belanja Modal</b> | -              | -              | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>       | -              | -              | <b>#DIV/0!</b> |

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian  | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | %       |
|---|----------------|----------------|---------|
| Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang | -              | -              | #DIV/0! |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                                   | -              | -              | #DIV/0! |
| <b>Pengembalian Belanja Modal</b>                             | -              | -              | #DIV/0! |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>                                   | -              | -              | #DIV/0! |

**PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Aset Lancar*

*Rp110.033.267*

**C.1. Aset Lancar**

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp110.033.267** dan **Rp57.398.600**.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara*

*Pengeluaran*

*Rp60.000.000*

**C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp60.000.000** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)*

| Keterangan                            | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Uang Tunai                            | -          | -          |
| Bank BRI No. Rek. 0039-01-001039-30-4 | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>                         | -          | -          |

*Kas di Bendahara*

*Penerimaan*

*Rp0*

**C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di



bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel xx

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

| Keterangan    | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|---------------|------------|------------|
| Uang Tunai    | -          | -          |
| Bank          | -          | -          |
| <b>Jumlah</b> | -          | -          |

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp0

### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

| Keterangan                           | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | -          | -          |
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan  | -          | -          |
| Kas Lainnya dari Hibah               | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>                        | -          | -          |

Piutang Bukan Pajak  
Rp0

### C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp1.829.967** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

| Uraian          | Tahun 2023       | Tahun 2022 |
|-----------------|------------------|------------|
| Piutang PNB     | 1.829.967        | -          |
| Piutang Lainnya | -                | -          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1.829.967</b> | -          |

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran

atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca. Piutang Bukan Pajak tersebut berupa Potongan SPM Sewa Rumah Dinas dari SPM Gaji Juli 2023

Bagian Lancar Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp0

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.  
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

| No. | Uraian        | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|---------------|------------|------------|
| 1   |               | -          | -          |
| 2   |               | -          | -          |
|     | <b>Jumlah</b> | -          | -          |

Bagian Lancar Tagihan  
Penjualan Angsuran  
Rp0

**C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**  
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.  
Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.  
Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022  
(dalam rupiah)

| No. | Uraian        | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|---------------|------------|------------|
| 1   |               | -          | -          |
| 2   |               | -          | -          |
|     | <b>Jumlah</b> | -          | -          |

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jk. Pendek Rp0

**C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**  
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.  
Pendek

(dalam rupiah)

| Kualitas Piutang                                | Nilai Piutang | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|---------------|------------|------------------|
| <b>Piutang Bukan Pajak</b>                      |               |            |                  |
| Lancar  | -             | 0,5%       | -                |
| Kurang Lancar                                   | -             | 10,0%      | -                |
| Diragukan                                       | -             | 50,0%      | -                |
| Macet   | -             | 100,0%     | -                |
| <b>Jumlah</b>                                   | -             |            | -                |
| <b>Bagian Lancar TP/TGR</b>                     |               |            |                  |
| Lancar  | -             | 0,5%       | -                |
| Kurang Lancar                                   | -             | 10,0%      | -                |
| Diragukan                                       | -             | 50,0%      | -                |
| Macet   | -             | 100,0%     | -                |
| <b>Jumlah</b>                                   | -             |            | -                |
| <b>Bagian Lancar TPA</b>                        |               |            |                  |
| Lancar  | -             | 0,5%       | -                |
| Kurang Lancar                                   | -             | 10,0%      | -                |
| Diragukan                                       | -             | 50,0%      | -                |
| Macet   | -             | 100,0%     | -                |
| <b>Jumlah</b>                                   | -             |            | -                |
| <b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b> | -             |            | -                |

Beban Dibayar di Muka  
Rp0

### C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

| Uraian                              | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Pembayaran Internet                 | -          | -          |
| Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin | -          | -          |
| Pembayaran Sewa Gedung Kantor       | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>                       | -          | -          |

Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp0

### C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

| Jenis                                    | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--|------------|------------|
| Pendapatan Jasa Pelatihan                | -          | -          |
| Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan | -          | -          |
| Jumlah                                   | -          | -          |

Persediaan  
Rp48.203.300

### C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp48.203.300** dan **Rp57.398.600** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

| Persediaan                | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|---------------------------|------------|------------|
| Barang Konsumsi           | 43.401.300 | 52.170.600 |
| Barang untuk Pemeliharaan | 4.802.000  | 5.228.000  |
| Jumlah                    | 48.203.300 | 57.398.600 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap  
Rp70.856.007.469

### C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp71.451.527.123** dan **Rp70.933.508.911**.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah  
Rp51.308.798.800

#### C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp51.308.798.800** dan **Rp51.308.798.800**

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Tanah*

(dalam rupiah)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>     | <b>51.308.798.800</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                             |                       |
| <b>Transfer Masuk</b>                             | -                     |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                             |                       |
| <b>Revaluasi Aset</b>                             | -                     |
| <b>Penghapusan</b>                                | -                     |
| <b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>                 | <b>51.308.798.800</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022</b> | -                     |
| <b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>            | <b>51.308.798.800</b> |

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Tanah TA 2023*

(dalam rupiah)

| <b>No.</b>    | <b>Luas</b>           | <b>Lokasi</b>                | <b>Nilai</b>         |
|---------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | 5.000 m <sup>2</sup>  | Jl. Cendrawasih No. 5, Bogor | 1.000.000.000        |
| <b>2</b>      | 2.000 m <sup>2</sup>  | Jl. Matoa No. 20, Bogor      | 500.000.000          |
| <b>3</b>      | 3.000 m <sup>2</sup>  | Jl. Padjajaran No. 28, Bogor | 750.000.000          |
| <b>4</b>      | 10.000 m <sup>2</sup> | Jl. Salak No. 18, Bogor      | 3.700.000.000        |
| <b>Jumlah</b> |                       |                              | <b>5.950.000.000</b> |

Tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Matoa No. 20, Bogor pada tanggal pelaporan dikuasi/digunakan oleh pihak ketiga.

*Peralatan dan Mesin*

*Rp12.778.879.833*

### **C.2.2. Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp12.778.879.833** dan **Rp11.334.331.533**.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*  
*(dalam rupiah)*

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b> | <b>11.334.331.533</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                         |                       |
| <b>Pembelian</b>                              | -                     |
| <b>Hibah</b>                                  | -                     |
| <b>Transfer Masuk</b>                         | 1.444.548.300         |
| <b>Koreksi Tambah</b>                         | -                     |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                         |                       |
| <b>Penghentian aset dari penggunaan</b>       |                       |
| <b>Saldo Per 30 Juni 2023</b>                 | <b>12.778.879.833</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023</b> | (10.875.615.058)      |
| <b>Nilai Buku Per 30 Juni 2023</b>            | <b>1.903.264.775</b>  |

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp700.000.000
2. Pembelian peralatan komputer berupa *Laptop* senilai Rp112.215.000.
3. Pembelian peralatan komputer berupa *printer* senilai Rp112.215.000.

Transfer Masuk peralatan kantor senilai Rp137.000.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan*  
*Rp20.984.419.531*

**C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp20.984.419.531** dan **Rp20.984.419.531**.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023*  
*(dalam rupiah)*

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b> | <b>20.984.419.531</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                         |                       |
| <b>Pembangunan Gedung</b>                     | -                     |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                         | -                     |
|   | -                     |
| <b>Saldo Per 30 Juni 2023</b>                 | <b>20.984.419.531</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023</b> | (5.411.539.289)       |
| <b>Nilai Buku Per 30 Juni 2023</b>            | <b>15.572.880.242</b> |

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp0

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan  
(dalam rupiah)

|  |   |
|--|---|
| <b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>    | - |
| <b>Mutasi tambah:</b>                            |   |
| <b>Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi</b> | - |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                            |   |
| <b>Koreksi Pencatatan</b>                        | - |
| <b>Saldo Per 30 Juni 2023</b>                    | - |
| <b>Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023</b>    | - |
| <b>Nilai Buku Per 30 Juni 2023</b>               | - |

Mutasi tambah: -

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya  
Rp120.656.391

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **120.656.391** dan **Rp109.656.391** dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx  
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya  
(dalam rupiah)

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b> | <b>109.656.391</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                         |                    |
| <b>Transfer Masuk</b>                         | <b>11.000.000</b>  |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                         |                    |
| -   | -                  |
| <b>Saldo Per 30 Juni 2023</b>                 | <b>120.656.391</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023</b> | -                  |
| <b>Nilai Buku Per 30 Juni 2023</b>            | <b>120.656.391</b> |

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Rp2.545.926.915

#### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.545.926.915** dan **Rp2.545.926.915** yang merupakan KDP renovasi gedung dan bangunan berupa Ruang Aula dan Ruang Arsip TA 2022 yang proses pengerjaannya pada Kantor Wilayah

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp (16.287.154.)

Kementerian Hukum dan HAM NTT belum selesai sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp16.287.154.347** dan **Rp15.349.624.258**.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

Tabel xx  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam rupiah)

| No | Aset Tetap                  | Nilai Perolehan       | Akum. Penyusutan      | Nilai Buku            |
|----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Peralatan dan Mesin         | 12.778.879.833        | 10.875.615.058        | 1.903.264.775         |
| 2  | Gedung dan Bangunan         | 20.984.419.531        | 5.411.539.289         | 15.572.880.242        |
| 3  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | -                     | -                     | -                     |
| 4  | Aset Tetap Lainnya          | 120.656.391           | -                     | 120.656.391           |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>33.883.955.755</b> | <b>16.287.154.347</b> | <b>17.596.801.408</b> |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang  
Rp0

### C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  
Rp0

#### C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:



*Tabel xx*  
*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022*  
*(dalam rupiah)*

| No. | Uraian        | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|---------------|------------|------------|
| 1   |               | -          | -          |
| 2   |               | -          | -          |
|     | <b>Jumlah</b> | -          | -          |

*Tagihan Penjualan  
 Angsuran Rp0*

**C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0**. dan **Rp0**, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022*  
*(dalam rupiah)*

| No. | Uraian        | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|---------------|------------|------------|
| 1   |               | -          | -          |
| 2   |               | -          | -          |
|     | <b>Jumlah</b> | -          | -          |

*Penyisihan Piutang  
 Tidak Tertagih –  
 Piutang Jangka  
 Panjang Rp0*

**C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.  
Panjang  
TA 2023

(dalam rupiah)

| Kualitas Piutang                                | Nilai Piutang | Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|---------------|------------|------------------|
| <b>Tagihan TP/TGR</b>                           |               |            |                  |
| Lancar  | -             | 0,50%      | -                |
| Kurang Lancar                                   | -             | 10%        | -                |
| Diragukan                                       | -             | 50%        | -                |
| Macet   | -             | 100%       | -                |
| <b>Jumlah</b>                                   | -             |            | -                |
| <b>Tagihan TPA</b>                              |               |            |                  |
| Lancar  | -             | 0,50%      | -                |
| Kurang Lancar                                   | -             | 10%        | -                |
| Diragukan                                       | -             | 50%        | -                |
| Macet   | -             | 100%       | -                |
| <b>Jumlah</b>                                   | -             |            | -                |
| <b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b> | -             |            | -                |

Aset Lainnya  
Rp40.854.003

#### C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp32.406.435** dan **Rp34.072.753**.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud  
Rp0

##### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel xx  
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

|  |   |
|--|---|
| Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022 | - |
| <b>Mutasi tambah:</b>                  |   |
| Transfer Masuk                         | - |
| <b>Saldo Per 30 Juni 2023</b>          | - |
| <b>Amortisasi s.d. 30 Juni 2023</b>    | - |
| <b>Nilai Buku Per 30 Juni 2023</b>     | - |

Mutasi tambah:  
Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023*  
*(dalam rupiah)*

| No.           | Uraian | Nilai |
|---------------|--------|-------|
| 1             | -      | -     |
| <b>Jumlah</b> |        | -     |

*Aset Lain-Lain*  
*Rp1.187.116.910*

**C.4.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah **Rp1.187.116.910** dan **Rp1.358.273.149**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Mutasi Aset Lain-lain*  
*(dalam rupiah)*

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b> | <b>1.358.273.149</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                         |                      |
| <b>Reklasifikasi dari Aset Tetap</b>          | -                    |
| <b>Mutasi Kurang:</b>                         |                      |
| <b>Penggunaan kembali BMN yang dihentikan</b> | -                    |
| <b>Penghapusan BMN</b>                        | -                    |
| <b>Saldo Per 30 Juni 2023</b>                 | <b>1.358.273.149</b> |
| <b>Amortisasi s.d. 30 Juni 2023</b>           | (1.154.710.475)      |
| <b>Nilai Buku Per 30 Juni 2023</b>            | <b>203.562.674</b>   |

Tidak terdapat Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*  
*Rp1.154.710.475*

**C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.154.710.475** dan **Rp1.324.200.396**. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023*  
*(dalam rupiah)*

| No | Aset Lainnya      | Nilai Perolehan      | Akum. Penyusutan       | Nilai Buku        |
|----|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| A. | Aset Tak Berwujud |                      |                        |                   |
|    | <b>Jumlah</b>     | -                    | -                      | -                 |
| B. | Aset Lain-lain    | 1.187.116.910        | (1.154.710.475)        | 32.406.435        |
|    | <b>Jumlah</b>     | <b>1.187.116.910</b> | <b>(1.154.710.475)</b> | <b>32.406.435</b> |
|    | <b>Total</b>      | <b>1.187.116.910</b> | <b>(1.154.710.475)</b> | <b>32.406.435</b> |

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban Jangka*

*Pendek Rp749.192.652*

### **C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp749.192.652** dan **Rp0**.

*Uang Muka dari KPPN*

*Rp60.000.000*

#### **C.5.1. Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp60.000.000** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak*

*Ketiga Rp0*

#### **C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp647.555.002** dan **Rp0**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023*

*(dalam rupiah)*

| No. | Uraian                                  | Jumlah      |
|-----|---|-------------|
| 1   | Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor | -           |
| 2   | Potongan Pajak yang belum disetor       | -           |
| 3   | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya       | -           |
| 4   | Gaji Pegawai yang belum dibayarkan      | 647.555.002 |

*Pendapatan Diterima di*

*Muka Rp0*

#### **C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut

bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023*  
*(dalam rupiah)*

| Uraian        | Jumlah |
|---------------|--------|
|               | -      |
|               | -      |
|               | -      |
| <b>Jumlah</b> | -      |

*Beban yang Masih  
Harus Dibayar Rp0*

**C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan  
2022*

| Uraian  | 2023 | 2022 |
|---|------|------|
| <b>Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar</b> | -    | 0    |
| <b>Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar</b>  | -    | 0    |
| <b>Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar</b>   | -    | 0    |
| <b>Jumlah</b>                                   | -    | 0    |

*Ekuitas  
Rp70.844.774.173*

**C.7 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar **Rp70.844.774.173** dan **Rp71.024.980.264**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

*Pendapatan  
PNBP  
Rp13.321.617*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp13.321.617** dan **Rp4.186.852**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian  | 2023              | 2022             | %             |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 13.321.617        | 4.186.852        | 218,18        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>13.321.617</b> | <b>4.186.852</b> | <b>218,18</b> |

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha

Beban  
Pegawai Rp  
6.202.013.177

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp6.202.013.177** dan **Rp6.024.182.642** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                    | 2023                 | 2022                 | %           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Beban Gaji                | 4.440.337.559        | 4.332.768.700        | 2,48        |
| Beban Tunjangan-tunjangan | 1.716.126.618        | 1.635.360.942        | 4,94        |
| Beban Lembur              | 45.549.000           | 56.053.000           | (18,74)     |
| <b>Jumlah Beban</b>       | <b>6.202.013.177</b> | <b>6.024.182.642</b> | <b>2,95</b> |

Beban  
Persediaan  
Rp82.676.800

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp82.676.800** dan **Rp55.680.450**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                    | 2023              | 2022              | %            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 82.676.800        | 55.680.450        | 48,484432    |
| <b>Jumlah Beban</b>       | <b>82.676.800</b> | <b>55.680.450</b> | <b>48,48</b> |

Beban Barang dan Jasa Rp 1.813.791.952

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.813.791.952** dan **Rp1.651.662.050**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

#### Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian   | 2023                 | 2022                 | %           |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Beban Keperluan Perkantoran                            | 438.426.100          | 524.404.870          | (16,40)     |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                 | 952.000              | 3.339.500            | (71,49)     |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja                   | 87.000.000           | 95.000.000           | (8,42)      |
| Beban Barang Operasional Lainnya                       | 5.683.350            | 7.865.700            | (27,75)     |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 12.720.000           | 63.109.950           | (79,84)     |
| Beban Bahan  | 188.340.600          | 199.706.200          | (5,69)      |
| Beban Honor Output Kegiatan                            | 38.960.000           | 36.700.000           | 6,16        |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya                   | 42.175.000           | 17.659.300           | 138,83      |
| Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel            | 54.000.000           | -                    | #DIV/0!     |
| Beban Langganan Listrik                                | 120.102.902          | 92.499.130           | 29,84       |
| Beban Langganan Air                                    | 10.575.000           | 7.730.000            | 36,80       |
| Beban Sewa   | 789.657.000          | 587.654.400          | 34,37       |
| Beban Jasa Profesi                                     | 25.200.000           | 14.400.000           | 75,00       |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19               | -                    | 1.593.000            | (100,00)    |
| <b>Jumlah Beban</b>                                    | <b>1.813.791.952</b> | <b>1.651.662.050</b> | <b>9,82</b> |

Beban Pemeliharaan Rp 302.148.600

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp302.148.600** dan **Rp483.534.000**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk

mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                                    | 2023               | 2022               | %              |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan    | 115.651.600        | 282.838.000        | (59,11)        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin    | 181.535.500        | 193.280.500        | (6,08)         |
| Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan | 4.961.500          | 7.415.500          | (33,09)        |
| <b>Jumlah Beban</b>                       | <b>302.148.600</b> | <b>483.534.000</b> | <b>(37,51)</b> |

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban  
Perjalanan  
Dinas Rp  
1.042.936.00  
0

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.042.936.000** dan **Rp628.533.250**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian  | 2023                 | 2022               | %            |
|---|----------------------|--------------------|--------------|
| Beban Perjalanan Dinas Biasa                    | 863.951.000          | 584.583.250        | 47,79        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 45.075.000           | 43.950.000         | 2,56         |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 133.910.000          | -                  | #DIV/0!      |
| <b>Jumlah Beban</b>                             | <b>1.042.936.000</b> | <b>628.533.250</b> | <b>65,93</b> |

**D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban  
Barang  
untuk

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.



Diserahkan  
Kepada  
Masyarakat  
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada  
Masyarakat  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian   | 2023     | 2022     | %        |
|--|----------|----------|----------|
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda | 0        | 0        | 0        |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda      | 0        | 0        | 0        |
| <b>Jumlah Beban</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Beban Bantuan  
Sosial Rp0

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian  | 2023     | 2022     | %        |
|---|----------|----------|----------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang | 0        | 0        | 0        |
| <b>Jumlah Beban</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Beban  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi Rp  
750.672.251

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp750.672.251** dan **Rp739.589.166**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian                               | 2023               | 2022               | %              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 268.986.064        | 254.068.999        | 5,87           |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 480.019.869        | 483.853.849        | (0,79)         |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya  | 1.666.318          | 1.666.318          | -              |
| <b>Jumlah Penyusutan</b>             | <b>750.672.251</b> | <b>739.589.166</b> | <b>1,50</b>    |
|                                      |                    |                    | -              |
| Beban Amortisasi Software            | -                  | -                  | #DIV/0!        |
| Beban Penyusutan Aset Lain-lain      | -                  | -                  | #DIV/0!        |
| <b>Jumlah Amortisasi</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Jumlah Beban</b>                  | <b>750.672.251</b> | <b>739.589.166</b> | <b>1,50</b>    |

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih Rp0*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian   | 2023     | 2022     | %        |
|--|----------|----------|----------|
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar     | 0        | 0        | 0        |
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar | 0        | 0        | 0        |
| <b>Jumlah Beban</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

Kegiatan Non Operasional  
Rp3.933.033

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| Uraian  | 2023             | 2022             | %             |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 311.999          | 4.123.456        | (92,43)       |
| Beban Kerugian Pelepasan Aset                 | -                | -                | #DIV/0!       |
| Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya   | 3.621.034        | -                | #DIV/0!       |
| <b>Jumlah Beban</b>                           | <b>3.933.033</b> | <b>4.123.456</b> | <b>(4,62)</b> |

**D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal  
Rp  
71.024.980.264

**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp71.024.980.264** dan **Rp69.324.431.983**.

Defisit LO  
Rp  
10.176.984.130

**E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar **Rp10.176.984.130** dan **Rp9.574.871.250**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan

**E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp0**.

Kebijakan  
Akuntansi  
Rp0  
Penyesuaian Nilai  
Aset Rp0

#### E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0

#### E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

| No.    | Jenis Persediaan | Koreksi |
|--------|------------------|---------|
| 1.     | Barang Konsumsi  | 0       |
| 2.     | Suku Cadang      | 0       |
| Jumlah |                  | 0       |

Selisih Revaluasi  
Aset Rp0

#### E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Koreksi Nilai Aset  
Non Revaluasi  
Rp0

#### E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

| Jenis Aset Tetap    | Nilai Koreksi |
|---------------------|---------------|
| Peralatan dan Mesin | -             |
| Gedung dan Bangunan | (379.564.020) |
| Jumlah              | (379.564.020) |

Koreksi Lain-lain  
Rp0

#### E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

| Jenis Koreksi      | Jumlah   |
|--------------------|----------|
| Koreksi Beban      | 0        |
| Koreksi Pendapatan | 0        |
| Koreksi Hibah      | 0        |
| <b>Jumlah</b>      | <b>0</b> |

Transaksi Antar Entitas  
Rp9.996.778.039

### E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp9.996.778.039** dan **Rp10.558.607.581**.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx

Transaksi Antar Entitas TA 2023

| Jenis Persediaan                       | Koreksi              |
|--|----------------------|
| Diterima dari Entitas Lain             | 15.424.683           |
| Ditagihkan ke Entitas Lain             | 9.518.986.577        |
| Transfer Masuk                         | 493.216.145          |
| Transfer Keluar                        | 0                    |
| Pengesahan Hibah Langsung              | 0                    |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | -                    |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>9.996.778.039</b> |

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar **Rp15.424.683** sedangkan DKEL sebesar **Rp9.518.986.577**.

#### E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar **Rp 493.216.145**, terdiri dari:

Tabel xx

Transfer Masuk TA 2023

| No.           | Jenis               | Entitas Asal                        | Nilai                |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1             | Peralatan dan Mesin | Divisi Yankum (408882)              | 64.667.371           |
|               |                     | Ditjen KI (097102)                  | 29.625.000           |
|               |                     | Divisi Imigrasi (408884)            | 4.429.000            |
| 2             | Tanah               | Balai Pemasarakatan Kupang (109148) | 2.186.573.000        |
| 3             | Gedung dan Bangunan | Balai Pemasarakatan Kupang (109148) | 298.074.837          |
| 4             | Software            | Divisi Yankum (408882)              | 7.750.000            |
| 5             | Aset Tetap Lainnya  | Divisi Yankum (408889)              | 13.000.000           |
| 6             | Persediaan          | Divisi Yankum (408882)              | 2.941.000            |
| <b>Jumlah</b> |                     |                                     | <b>2.607.060.208</b> |

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

### **E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar **Rp0** dari total **Rp0** yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah **Rp0**.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx*  
*Pengesahan Hibah Langsung TA 2023*

| No.                                  | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Pengesahan |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.                                   |               |              | 0                |
| 2.                                   |               |              | 0                |
| <b>Total Pengesahan</b>              |               |              | <b>0</b>         |
| <b>Pengesahan Pengembalian Hibah</b> |               |              | <b>-</b>         |
| <b>Jumlah</b>                        |               |              | <b>0</b>         |

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Ekuitas Akhir Rp  
70.844.774.173*

**E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp70.844.774.173** dan **Rp70.308.168.314**.

**PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

**F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

- Nihil-

**F.1 Pengungkapan Lain-lain**

- Nihil-

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 2400  
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
NUSA TENGGARA TIMUR  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 11/07/2023 11:04 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrua\_satker --rekon17

| KODE TRN      | KODE AKUN | NAMA AKUN   | DEBET                 | KREDIT                |
|---------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1             | 2         | 3   | 4                     | 5                     |
| 0.0           | 117111    | Barang Konsumsi   | 52,170,600            | 0                     |
| 0.0           | 117113    | Bahan untuk Pemeliharaan  | 5,228,000             | 0                     |
| 0.0           | 131111    | Tanah   | 51,308,798,800        | 0                     |
| 0.0           | 132111    | Peralatan dan Mesin   | 11,334,331,533        | 0                     |
| 0.0           | 133111    | Gedung dan Bangunan   | 20,984,419,531        | 0                     |
| 0.0           | 135121    | Aset Tetap Lainnya  | 109,656,391           | 0                     |
| 0.0           | 136111    | Konstruksi Dalam pengerjaan   | 2,545,926,915         | 0                     |
| 0.0           | 137111    | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  | 0                     | 10,418,104,839        |
| 0.0           | 137211    | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan  | 0                     | 4,931,519,420         |
| 0.0           | 166112    | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan                      | 1,358,273,149         | 0                     |
| 0.0           | 169122    | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0                     | 1,324,200,396         |
| 0.0           | 391111    | Ekuitas   | 0                     | 71,024,980,264        |
| <b>JUMLAH</b> |           |   | <b>87,698,804,919</b> | <b>87,698,804,919</b> |



**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG**

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 11/07/23 11:06 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

| NAMA PERKIRAAN                               | JUMLAH                |                       | Kenaikan (Penurunan) |               |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|  | 2023                  | 2022                  | Jumlah               | %             |
| 1  | 2                     | 3                     | 4                    | 5             |
| <b>ASET</b>                                  |                       |                       |                      |               |
| <b>ASET LANCAR</b>                           |                       |                       |                      |               |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                 | 60,000,000            | 0                     | 60,000,000           | 0.00          |
| Piutang Bukan Pajak                          | 1,829,967             | 0                     | 1,829,967            | 0.00          |
| PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)                  | 1,829,967             | 0                     | 1,829,967            | 0.00          |
| Persediaan                                   | 48,203,300            | 57,398,600            | (9,195,300)          | (16.02)       |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                    | <b>110,033,267</b>    | <b>57,398,600</b>     | <b>52,634,667</b>    | <b>91.70</b>  |
| <b>ASET TETAP</b>                            |                       |                       |                      |               |
| Tanah  | 51,308,798,800        | 51,308,798,800        | 0                    | 0.00          |
| Peralatan dan Mesin                          | 12,778,879,833        | 11,334,331,533        | 1,444,548,300        | 12.74         |
| Gedung dan Bangunan                          | 20,984,419,531        | 20,984,419,531        | 0                    | 0.00          |
| Aset Tetap Lainnya                           | 120,656,391           | 109,656,391           | 11,000,000           | 10.03         |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                  | 2,545,926,915         | 2,545,926,915         | 0                    | 0.00          |
| AKUMULASI PENYUSUTAN                         | (16,287,154,347)      | (15,349,624,259)      | (937,530,088)        | 6.11          |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                     | <b>71,451,527,123</b> | <b>70,933,508,911</b> | <b>518,018,212</b>   | <b>0.73</b>   |
| <b>ASET LAINNYA</b>                          |                       |                       |                      |               |
| Aset Lain-lain                               | 1,187,116,910         | 1,358,273,149         | (171,156,239)        | (12.60)       |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | (1,154,710,475)       | (1,324,200,396)       | 169,489,921          | (12.80)       |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                   | <b>32,406,435</b>     | <b>34,072,753</b>     | <b>(1,666,318)</b>   | <b>(4.89)</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                           | <b>71,593,966,825</b> | <b>71,024,980,264</b> | <b>568,986,561</b>   | <b>0.80</b>   |
| <b>KEWAJIBAN</b>                             |                       |                       |                      |               |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>               |                       |                       |                      |               |
| Utang kepada Pihak Ketiga                    | 647,555,002           | 0                     | 647,555,002          | 0.00          |
| Utang Yang Belum Ditagihkan                  | 41,637,650            | 0                     | 41,637,650           | 0.00          |
| Uang Muka dari KPPN                          | 60,000,000            | 0                     | 60,000,000           | 0.00          |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        | <b>749,192,652</b>    | <b>0</b>              | <b>749,192,652</b>   |               |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                      | <b>749,192,652</b>    | <b>0</b>              | <b>749,192,652</b>   |               |
| <b>EKUITAS</b>                               |                       |                       |                      |               |
| <b>EKUITAS</b>                               |                       |                       |                      |               |
| Ekuitas                                      | 70,844,774,173        | 71,024,980,264        | (180,206,091)        | (0.25)        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                        | <b>70,844,774,173</b> | <b>71,024,980,264</b> | <b>(180,206,091)</b> | <b>(0.25)</b> |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                        | <b>70,844,774,173</b> | <b>71,024,980,264</b> | <b>(180,206,091)</b> | <b>(0.25)</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>          | <b>71,593,966,825</b> | <b>71,024,980,264</b> | <b>568,986,561</b>   | <b>0.80</b>   |

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG**

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 11/07/23 11:06 AM  
Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

- \*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
- \*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

KUPANG, 11 Juli 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

MARCIANA D. JONE, S.H.  
196411261991032001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/07/23 11:12 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN   | DEBET         | KREDIT        |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|
| 1        | 2         | 3   | 4             | 5             |
| 3.0      | 521111    | Belanja Keperluan Perkantoran                               | 431,481,400   | 0             |
| 3.0      | 521219    | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                      | 42,175,000    | 0             |
| 3.0      | 522141    | Belanja Sewa  | 788,672,000   | 0             |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0             | 3,621,034     |
| 3.0      | 521131    | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19    | 12,720,000    | 0             |
| 3.0      | 511111    | Belanja Gaji Pokok PNS                                      | 3,950,475,000 | 0             |
| 3.0      | 511124    | Belanja Tunj. Fungsional PNS                                | 284,580,000   | 0             |
| 3.0      | 511151    | Belanja Tunjangan Umum PNS                                  | 108,185,000   | 0             |
| 3.0      | 524113    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                         | 45,075,000    | 0             |
| 3.0      | 521211    | Belanja Bahan   | 156,630,100   | 0             |
| 3.0      | 521811    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                   | 69,743,000    | 0             |
| 3.1      | 511151    | Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS                     | 0             | 370,000       |
| 3.0      | 425131    | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                 | 0             | 11,491,650    |
| 3.0      | 425122    | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin               | 0             | 311,999       |
| 3.0      | 511123    | Belanja Tunj. Struktural PNS                                | 227,330,000   | 0             |
| 3.0      | 511125    | Belanja Tunj. PPh PNS                                       | 27,062,506    | 0             |
| 3.0      | 522151    | Belanja Jasa Profesi  | 25,200,000    | 0             |
| 3.0      | 523112    | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 8,700,000     | 0             |
| 3.0      | 511121    | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                               | 245,009,550   | 0             |
| 3.0      | 511126    | Belanja Tunj. Beras PNS                                     | 204,514,080   | 0             |
| 3.0      | 524111    | Belanja Perjalanan Biasa                                    | 845,878,000   | 0             |
| 3.0      | 524114    | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota           | 133,910,000   | 0             |
| 3.0      | 521115    | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                      | 87,000,000    | 0             |
| 3.0      | 521119    | Belanja Barang Operasional Lainnya                          | 5,591,900     | 0             |
| 3.0      | 521213    | Belanja Honor Output Kegiatan                               | 38,960,000    | 0             |
| 3.1      | 511119    | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS                    | 0             | 540           |
| 0.0      | 313111    | DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN                                  | 0             | 9,518,986,577 |
| 3.0      | 511119    | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                 | 63,447        | 0             |
| 3.0      | 522113    | Belanja Langganan Air                                       | 10,575,000    | 0             |
| 3.0      | 523111    | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                    | 115,476,600   | 0             |
| 3.0      | 523121    | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                    | 179,804,500   | 0             |
| 3.0      | 511122    | Belanja Tunj. Anak PNS                                      | 71,417,132    | 0             |
| 3.0      | 511129    | Belanja Uang Makan PNS                                      | 408,716,000   | 0             |
| 3.0      | 532111    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                           | 827,808,000   | 0             |
| 3.0      | 512211    | Belanja Uang Lembur   | 45,549,000    | 0             |
| 3.0      | 521114    | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                    | 952,000       | 0             |
| 3.0      | 522111    | Belanja Langganan Listrik                                   | 120,102,902   | 0             |
| 0.0      | 313121    | DITERIMA DARI ENTITAS LAIN                                  | 15,424,683    | 0             |

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/07/23 11:12 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET         | KREDIT        |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 1        | 2         | 3         | 4             | 5             |
| JUMLAH   |           |           | 9,534,781,800 | 9,534,781,800 |

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

KUPANG, 11 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

MARCIANA D. JONE, S.H.

196411261991032001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/07/23 11:13 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN   | DEBIT          | KREDIT         |
|----------|-----------|---|----------------|----------------|
| 1        | 2         | 3   | 4              | 5              |
| 0.0      | 111611    | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 60,000,000     | 0              |
| 0.0      | 115212    | Piutang Lainnya   | 1,829,967      | 0              |
| 0.0      | 117111    | Barang Konsumsi   | 43,401,300     | 0              |
| 0.0      | 117113    | Bahan untuk Pemeliharaan  | 4,802,000      | 0              |
| 0.0      | 131111    | Tanah   | 51,308,798,800 | 0              |
| 0.0      | 132111    | Peralatan dan Mesin   | 12,778,879,833 | 0              |
| 0.0      | 133111    | Gedung dan Bangunan   | 20,984,419,531 | 0              |
| 0.0      | 135121    | Aset Tetap Lainnya  | 120,656,391    | 0              |
| 0.0      | 136111    | Konstruksi Dalam pengerjaan   | 2,545,926,915  | 0              |
| 0.0      | 137111    | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  | 0              | 10,875,615,058 |
| 0.0      | 137211    | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan  | 0              | 5,411,539,289  |
| 0.0      | 166112    | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan                      | 1,187,116,910  | 0              |
| 0.0      | 169122    | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0              | 1,154,710,475  |
| 0.0      | 212111    | Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar  | 0              | 629,482,002    |
| 0.0      | 212112    | Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar   | 0              | 18,073,000     |
| 0.0      | 218111    | Utang Yang Belum Diterima Tagihannya  | 0              | 41,637,650     |
| 0.0      | 219511    | Uang Muka dari KPPN   | 0              | 60,000,000     |
| 0.0      | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain  | 0              | 9,518,986,577  |
| 0.0      | 313121    | Diterima dari Entitas Lain  | 15,424,683     | 0              |
| 0.0      | 313221    | Transfer Masuk  | 0              | 493,216,145    |
| 0.0      | 391111    | Ekuitas   | 0              | 71,024,980,264 |
| 3.0      | 425122    | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                                   | 0              | 311,999        |
| 3.0      | 425131    | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                     | 0              | 13,321,617     |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                     | 0              | 3,621,034      |
| 3.0      | 511111    | Beban Gaji Pokok PNS  | 4,440,267,500  | 0              |
| 3.0      | 511119    | Beban Pembulatan Gaji PNS   | 70,059         | 0              |
| 3.0      | 511121    | Beban Tunj. Suami/Istri PNS   | 275,686,930    | 0              |
| 3.0      | 511122    | Beban Tunj. Anak PNS  | 80,262,672     | 0              |
| 3.0      | 511123    | Beban Tunj. Struktural PNS  | 254,655,000    | 0              |
| 3.0      | 511124    | Beban Tunj. Fungsional PNS  | 318,265,000    | 0              |
| 3.0      | 511125    | Beban Tunj. PPh PNS   | 27,967,676     | 0              |
| 3.0      | 511126    | Beban Tunj. Beras PNS   | 230,078,340    | 0              |
| 3.0      | 511129    | Beban Uang Makan PNS  | 408,716,000    | 0              |
| 3.0      | 511151    | Beban Tunjangan Umum PNS  | 120,495,000    | 0              |
| 3.0      | 512211    | Beban Uang Lembur   | 45,549,000     | 0              |
| 3.0      | 521111    | Beban Keperluan Perkantoran   | 438,426,100    | 0              |
| 3.0      | 521114    | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  | 952,000        | 0              |

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/07/23 11:13 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

| KODE TRN      | KODE AKUN | NAMA AKUN  | DEBIT                 | KREDIT                |
|---------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1             | 2         | 3  | 4                     | 5                     |
| 3.0           | 521115    | Beban Honor Operasional Satuan Kerja   | 87,000,000            | 0                     |
| 3.0           | 521119    | Beban Barang Operasional Lainnya   | 5,683,350             | 0                     |
| 3.0           | 521131    | Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19                                   | 12,720,000            | 0                     |
| 3.0           | 521211    | Beban Bahan  | 188,340,600           | 0                     |
| 3.0           | 521213    | Beban Honor Output Kegiatan  | 38,960,000            | 0                     |
| 3.0           | 521219    | Beban Barang Non Operasional Lainnya   | 42,175,000            | 0                     |
| 3.0           | 522111    | Beban Langganan Listrik  | 120,102,902           | 0                     |
| 3.0           | 522113    | Beban Langganan Air  | 10,575,000            | 0                     |
| 3.0           | 522141    | Beban Sewa   | 789,657,000           | 0                     |
| 3.0           | 522151    | Beban Jasa Profesi   | 25,200,000            | 0                     |
| 3.0           | 523111    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 115,651,600           | 0                     |
| 3.0           | 523121    | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 181,535,500           | 0                     |
| 3.0           | 524111    | Beban Perjalanan Biasa   | 863,951,000           | 0                     |
| 3.0           | 524113    | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 45,075,000            | 0                     |
| 3.0           | 524114    | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  | 133,910,000           | 0                     |
| 3.0           | 591111    | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin   | 268,986,064           | 0                     |
| 3.0           | 591211    | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan   | 480,019,869           | 0                     |
| 3.0           | 592222    | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 1,666,318             | 0                     |
| 3.0           | 593111    | Beban Persediaan konsumsi  | 82,676,800            | 0                     |
| 3.0           | 593113    | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan  | 4,961,500             | 0                     |
| 3.0           | 595112    | Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin  | 54,000,000            | 0                     |
| <b>JUMLAH</b> |           |  | <b>99,245,495,110</b> | <b>99,245,495,110</b> |

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

KUPANG, 11 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

MARCIANA D. JONE, S.H.

196411261991032001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl Data : 12/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 12/07/23 11:29 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN   | DEBET          | KREDIT         |
|----------|-----------|---|----------------|----------------|
| 1        | 2         | 3   | 4              | 5              |
| 0.0      | 111611    | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 60,000,000     | 0              |
| 0.0      | 115212    | Piutang Lainnya   | 1,829,967      | 0              |
| 0.0      | 117111    | Barang Konsumsi   | 43,401,300     | 0              |
| 0.0      | 117113    | Bahan untuk Pemeliharaan  | 4,802,000      | 0              |
| 0.0      | 131111    | Tanah   | 51,308,798,800 | 0              |
| 0.0      | 132111    | Peralatan dan Mesin   | 12,778,879,833 | 0              |
| 0.0      | 133111    | Gedung dan Bangunan   | 20,984,419,531 | 0              |
| 0.0      | 135121    | Aset Tetap Lainnya  | 120,656,391    | 0              |
| 0.0      | 136111    | Konstruksi Dalam pengerjaan   | 2,545,926,915  | 0              |
| 0.0      | 137111    | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  | 0              | 10,875,615,058 |
| 0.0      | 137211    | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan  | 0              | 5,411,539,289  |
| 0.0      | 166112    | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan                      | 1,187,116,910  | 0              |
| 0.0      | 169122    | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0              | 1,154,710,475  |
| 0.0      | 212111    | Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar  | 0              | 629,482,002    |
| 0.0      | 212112    | Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar   | 0              | 18,073,000     |
| 0.0      | 218111    | Utang Yang Belum Diterima Tagihannya  | 0              | 41,637,650     |
| 0.0      | 219511    | Uang Muka dari KPPN   | 0              | 60,000,000     |
| 0.0      | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain  | 0              | 9,518,986,577  |
| 0.0      | 313121    | Diterima dari Entitas Lain  | 15,424,683     | 0              |
| 0.0      | 313221    | Transfer Masuk  | 0              | 493,216,145    |
| 0.0      | 391111    | Ekuitas   | 0              | 71,024,980,264 |
| 3.0      | 425122    | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                                   | 0              | 311,999        |
| 3.0      | 425131    | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                     | 0              | 13,321,617     |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                     | 0              | 3,621,034      |
| 3.0      | 511111    | Beban Gaji Pokok PNS  | 4,440,267,500  | 0              |
| 3.0      | 511119    | Beban Pembulatan Gaji PNS   | 70,059         | 0              |
| 3.0      | 511121    | Beban Tunj. Suami/Istri PNS   | 275,686,930    | 0              |
| 3.0      | 511122    | Beban Tunj. Anak PNS  | 80,262,672     | 0              |
| 3.0      | 511123    | Beban Tunj. Struktural PNS  | 254,655,000    | 0              |
| 3.0      | 511124    | Beban Tunj. Fungsional PNS  | 318,265,000    | 0              |
| 3.0      | 511125    | Beban Tunj. PPh PNS   | 27,967,676     | 0              |
| 3.0      | 511126    | Beban Tunj. Beras PNS   | 230,078,340    | 0              |
| 3.0      | 511129    | Beban Uang Makan PNS  | 408,716,000    | 0              |
| 3.0      | 511151    | Beban Tunjangan Umum PNS  | 120,495,000    | 0              |
| 3.0      | 512211    | Beban Uang Lembur   | 45,549,000     | 0              |
| 3.0      | 521111    | Beban Keperluan Perkantoran   | 438,426,100    | 0              |
| 3.0      | 521114    | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  | 952,000        | 0              |

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl Data : 12/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 12/07/23 11:29 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

| KODE TRN      | KODE AKUN | NAMA AKUN  | DEBIT                 | KREDIT                |
|---------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1             | 2         | 3  | 4                     | 5                     |
| 3.0           | 521115    | Beban Honor Operasional Satuan Kerja   | 87,000,000            | 0                     |
| 3.0           | 521119    | Beban Barang Operasional Lainnya   | 5,683,350             | 0                     |
| 3.0           | 521131    | Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19                                   | 12,720,000            | 0                     |
| 3.0           | 521211    | Beban Bahan  | 188,340,600           | 0                     |
| 3.0           | 521213    | Beban Honor Output Kegiatan  | 38,960,000            | 0                     |
| 3.0           | 521219    | Beban Barang Non Operasional Lainnya   | 42,175,000            | 0                     |
| 3.0           | 521252    | Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel  | 54,000,000            | 0                     |
| 3.0           | 522111    | Beban Langganan Listrik  | 120,102,902           | 0                     |
| 3.0           | 522113    | Beban Langganan Air  | 10,575,000            | 0                     |
| 3.0           | 522141    | Beban Sewa   | 789,657,000           | 0                     |
| 3.0           | 522151    | Beban Jasa Profesi   | 25,200,000            | 0                     |
| 3.0           | 523111    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 115,651,600           | 0                     |
| 3.0           | 523121    | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 181,535,500           | 0                     |
| 3.0           | 524111    | Beban Perjalanan Biasa   | 863,951,000           | 0                     |
| 3.0           | 524113    | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 45,075,000            | 0                     |
| 3.0           | 524114    | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  | 133,910,000           | 0                     |
| 3.0           | 591111    | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin   | 268,986,064           | 0                     |
| 3.0           | 591211    | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan   | 480,019,869           | 0                     |
| 3.0           | 592222    | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 1,666,318             | 0                     |
| 3.0           | 593111    | Beban Persediaan konsumsi  | 82,676,800            | 0                     |
| 3.0           | 593113    | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan  | 4,961,500             | 0                     |
| <b>JUMLAH</b> |           |  | <b>99,245,495,110</b> | <b>99,245,495,110</b> |

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

KUPANG, 12 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

MARCIANA D. JONE, S.H.

196411261991032001





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013  
**ESELON I** : SEKRETARIAT JENDERAL 01  
**SATUAN KERJA** : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG 408886

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 11/07/23 11:15 AM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_komparatif

| NO       | URAIAN                             | 2023                  |                      |                                    |           | 2022                  |                      |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
|          |                                    | ANGGARAN              | REALISASI            | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | %         | ANGGARAN              | REALISASI            | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | %         |
| 1        | 2                                  | 3                     | 4                    | 5                                  | 6         | 3                     | 4                    | 5                                  | 6         |
|          | Dana Alokasi Umum                  | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         |
|          | Dana Alokasi Khusus Fisik          | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         |
|          | Data Otonomi Khusus                | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         |
|          | Dana Alokasi Khusus Non Fisik      | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         |
|          | Dana Desa                          | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         | 0                     | 0                    | 0                                  | 0         |
|          | <b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b> | <b>22,961,076,000</b> | <b>9,518,986,577</b> | <b>13,442,089,423</b>              | <b>41</b> | <b>25,422,197,000</b> | <b>8,081,800,255</b> | <b>17,340,396,745</b>              | <b>32</b> |
| <b>C</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>                  |                       |                      |                                    | 0         |                       |                      |                                    | 0         |

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

KUPANG, 11 Juli 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

MARCIANA D. JONE, S.H.  
196411261991032001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 2400 **NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SATUAN KERJA** : 408886 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 11/07/23 11:16 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 11/7/23 6:38 AM

| KODE   | URAIAN   | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |               | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|        |  |                 |                         | BELANJA           | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO |                      |               |
| 1      | 2  | 3               | 4                       | 5                 | 6                    | 7=5-6         | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 51     | BELANJA PEGAWAI  |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 5111   | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS                           |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS                                   | 5,569,280,000   | 5,569,280,000           | 3,950,475,000     | 0                    | 3,950,475,000 | 70.93                | 1,618,805,000 |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                              | 110,000         | 110,000                 | 63,447            | 540                  | 62,907        | 57.68                | 47,093        |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                            | 661,043,000     | 661,043,000             | 245,009,550       | 0                    | 245,009,550   | 37.06                | 416,033,450   |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS                                   | 120,891,000     | 120,891,000             | 71,417,132        | 0                    | 71,417,132    | 59.08                | 49,473,868    |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS                             | 474,530,000     | 474,530,000             | 227,330,000       | 0                    | 227,330,000   | 47.91                | 247,200,000   |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS                             | 335,914,000     | 335,914,000             | 284,580,000       | 0                    | 284,580,000   | 84.72                | 51,334,000    |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS                                    | 21,864,000      | 21,864,000              | 27,062,506        | 0                    | 27,062,506    | 123.78               | (5,198,506)   |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS                                  | 341,918,000     | 341,918,000             | 204,514,080       | 0                    | 204,514,080   | 59.81                | 137,403,920   |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS                                   | 1,445,400,000   | 1,445,400,000           | 408,716,000       | 0                    | 408,716,000   | 28.28                | 1,036,684,000 |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS                               | 197,832,000     | 197,832,000             | 108,185,000       | 370,000              | 107,815,000   | 54.69                | 90,017,000    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111                         | 9,168,782,000   | 9,168,782,000           | 5,527,352,715     | 370,540              | 5,526,982,175 | 60.28                | 3,641,799,825 |
| 5122   | Belanja Lembur   |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 512211 | Belanja Uang Lembur                                      | 86,382,000      | 86,382,000              | 45,549,000        | 0                    | 45,549,000    | 52.73                | 40,833,000    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122                         | 86,382,000      | 86,382,000              | 45,549,000        | 0                    | 45,549,000    | 52.73                | 40,833,000    |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51                               | 9,255,164,000   | 9,255,164,000           | 5,572,901,715     | 370,540              | 5,572,531,175 | 60.21                | 3,682,632,825 |
| 52     | BELANJA BARANG   |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 5211   | Belanja Barang Operasional                               |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran                            | 898,665,000     | 934,888,000             | 431,481,400       | 0                    | 431,481,400   | 46.15                | 503,406,600   |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                 | 12,000,000      | 12,000,000              | 952,000           | 0                    | 952,000       | 7.93                 | 11,048,000    |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                   | 222,720,000     | 222,720,000             | 87,000,000        | 0                    | 87,000,000    | 39.06                | 135,720,000   |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya                       | 12,438,000      | 12,438,000              | 5,591,900         | 0                    | 5,591,900     | 44.96                | 6,846,100     |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 40,000,000      | 30,000,000              | 12,720,000        | 0                    | 12,720,000    | 42.4                 | 17,280,000    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211                         | 1,185,823,000   | 1,212,046,000           | 537,745,300       | 0                    | 537,745,300   | 44.37                | 674,300,700   |
| 5212   | Belanja Barang Non Operasional                           |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521211 | Belanja Bahan  | 358,725,000     | 475,680,000             | 156,630,100       | 0                    | 156,630,100   | 32.93                | 319,049,900   |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan                            | 114,060,000     | 114,060,000             | 38,960,000        | 0                    | 38,960,000    | 34.16                | 75,100,000    |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                   | 182,065,000     | 166,265,000             | 42,175,000        | 0                    | 42,175,000    | 25.37                | 124,090,000   |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212                         | 654,850,000     | 756,005,000             | 237,765,100       | 0                    | 237,765,100   | 31.45                | 518,239,900   |
| 5218   | Belanja Barang Persediaan                                |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                | 515,000,000     | 135,000,000             | 69,743,000        | 0                    | 69,743,000    | 51.66                | 65,257,000    |
| 521841 | Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19  | 225,100,000     | 15,100,000              | 0                 | 0                    | 0             | 0                    | 15,100,000    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218                         | 740,100,000     | 150,100,000             | 69,743,000        | 0                    | 69,743,000    | 46.46                | 80,357,000    |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 01  
**WILAYAH/PROVINSI** : 2400  
**SATUAN KERJA** : 408886  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 11/07/23 11:16 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
Tgl Data : 11/7/23 6:38 AM

| KODE   | URAIAN  | ANGGARAN SEMULA       | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                      |                      | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN         |
|--------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|        |   |                       |                         | BELANJA              | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO        |                      |                       |
| 1      | 2   | 3                     | 4                       | 5                    | 6                    | 7=5-6                | 8=5/4                | 9=4-7                 |
| 5221   | Belanja Jasa                                      |                       |                         |                      |                      |                      |                      |                       |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik                         | 240,000,000           | 240,000,000             | 120,102,902          | 0                    | 120,102,902          | 50.04                | 119,897,098           |
| 522113 | Belanja Langganan Air                             | 24,000,000            | 24,000,000              | 10,575,000           | 0                    | 10,575,000           | 44.06                | 13,425,000            |
| 522141 | Belanja Sewa                                      | 267,600,000           | 904,072,000             | 788,672,000          | 0                    | 788,672,000          | 87.24                | 115,400,000           |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi                              | 54,900,000            | 51,300,000              | 25,200,000           | 0                    | 25,200,000           | 49.12                | 26,100,000            |
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya                              | 14,000,000            | 14,000,000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 14,000,000            |
| 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19        | 16,023,000            | 1,090,000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1,090,000             |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>           | <b>616,523,000</b>    | <b>1,234,462,000</b>    | <b>944,549,902</b>   | <b>0</b>             | <b>944,549,902</b>   | <b>76.52</b>         | <b>289,912,098</b>    |
| 5231   | Belanja Pemeliharaan                              |                       |                         |                      |                      |                      |                      |                       |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          | 557,477,000           | 498,715,000             | 115,476,600          | 0                    | 115,476,600          | 23.15                | 383,238,400           |
| 523112 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan | 31,820,000            | 21,820,000              | 8,700,000            | 0                    | 8,700,000            | 39.87                | 13,120,000            |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          | 476,250,000           | 518,250,000             | 179,804,500          | 0                    | 179,804,500          | 34.69                | 338,445,500           |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>           | <b>1,065,547,000</b>  | <b>1,038,785,000</b>    | <b>303,981,100</b>   | <b>0</b>             | <b>303,981,100</b>   | <b>29.26</b>         | <b>734,803,900</b>    |
| 5241   | Belanja Perjalanan Dalam Negeri                   |                       |                         |                      |                      |                      |                      |                       |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa                          | 2,881,720,000         | 2,566,440,000           | 845,878,000          | 0                    | 845,878,000          | 32.96                | 1,720,562,000         |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 133,350,000           | 138,025,000             | 45,075,000           | 0                    | 45,075,000           | 32.66                | 92,950,000            |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0                     | 182,050,000             | 133,910,000          | 0                    | 133,910,000          | 73.56                | 48,140,000            |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>           | <b>3,015,070,000</b>  | <b>2,886,515,000</b>    | <b>1,024,863,000</b> | <b>0</b>             | <b>1,024,863,000</b> | <b>35.51</b>         | <b>1,861,652,000</b>  |
|        | <b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>                 | <b>7,277,913,000</b>  | <b>7,277,913,000</b>    | <b>3,118,647,402</b> | <b>0</b>             | <b>3,118,647,402</b> | <b>42.85</b>         | <b>4,159,265,598</b>  |
| 53     | BELANJA MODAL                                     |                       |                         |                      |                      |                      |                      |                       |
| 5321   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 |                       |                         |                      |                      |                      |                      |                       |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 828,608,000           | 828,608,000             | 827,808,000          | 0                    | 827,808,000          | 99.9                 | 800,000               |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>           | <b>828,608,000</b>    | <b>828,608,000</b>      | <b>827,808,000</b>   | <b>0</b>             | <b>827,808,000</b>   | <b>99.9</b>          | <b>800,000</b>        |
| 5331   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 |                       |                         |                      |                      |                      |                      |                       |
| 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan      | 0                     | 5,599,391,000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 5,599,391,000         |
|        | <b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331</b>           | <b>0</b>              | <b>5,599,391,000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>5,599,391,000</b>  |
|        | <b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>                 | <b>828,608,000</b>    | <b>6,427,999,000</b>    | <b>827,808,000</b>   | <b>0</b>             | <b>827,808,000</b>   | <b>12.88</b>         | <b>5,600,191,000</b>  |
|        | <b>JUMLAH BELANJA</b>                             | <b>17,361,685,000</b> | <b>22,961,076,000</b>   | <b>9,519,357,117</b> | <b>370,540</b>       | <b>9,518,986,577</b> | <b>41.46</b>         | <b>13,442,089,423</b> |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 01  
**WILAYAH/PROVINSI** : 2400  
**SATUAN KERJA** : 408886

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 11/07/23 11:17 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

| KODE   | URAIAN  | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN |                            |                  | % REALISASI<br>PENDAPATAN |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
|        |   |                     | PENDAPATAN           | PENGEMBALIAN<br>PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO |                           |
| 1      | 2   | 3                   | 4                    | 5                          | 6=4-5            | 7=6/3                     |
| 42     | PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                          |                     |                      |                            |                  |                           |
| 4251   | Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan |                     |                      |                            |                  |                           |
| 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                     | 0                   | 311,999              | 0                          | 311,999          | 0                         |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                       | 0                   | 11,491,650           | 0                          | 11,491,650       | 0                         |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251                               | 0                   | 11,803,649           | 0                          | 11,803,649       |                           |
| 4259   | Pendapatan Lain-Lain  |                     |                      |                            |                  |                           |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu       | 0                   | 3,621,034            | 0                          | 3,621,034        | 0                         |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259                               | 0                   | 3,621,034            | 0                          | 3,621,034        |                           |
|        | JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42                                     | 0                   | 15,424,683           | 0                          | 15,424,683       |                           |
|        | JUMLAH PENDAPATAN   | 0                   | 15,424,683           | 0                          | 15,424,683       |                           |

# LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR**

**SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG**

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/07/23 11:19 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

| URAIAN  | 2023          | 2022          | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)      |
|---|---------------|---------------|------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL  | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN OPERASIONAL  | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN   | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Penghasilan                                  | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan                            | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan          | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Cukai  | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Lainnya                                      | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Masuk  | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Keluar   | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan                                  | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK                                 | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Sumber Daya Alam                                   | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba                        | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                         | 13,321,617    | 4,186,852     | 9,134,765              | 218.177  |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | 13,321,617    | 4,186,852     | 9,134,765              | 218.177  |
| PENDAPATAN HIBAH  | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Hibah  | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Hibah                                       | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan   | 13,321,617    | 4,186,852     | 9,134,765              | 218.177  |
| BEBAN OPERASIONAL   | 0             | 0             | 0                      |          |
| Beban Pegawai   | 6,202,013,177 | 6,024,182,642 | 177,830,535            | 2.952    |
| Beban Persediaan  | 82,676,800    | 55,680,450    | 26,996,350             | 48.484   |
| Beban Barang dan Jasa   | 1,813,791,952 | 1,651,662,050 | 162,129,902            | 9.816    |
| Beban Pemeliharaan  | 302,148,600   | 483,534,000   | (181,385,400)          | (37.512) |
| Beban Perjalanan Dinas  | 1,042,936,000 | 628,533,250   | 414,402,750            | 65.932   |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat               | 0             | 0             | 0                      |          |
| Beban Bunga   | 0             | 0             | 0                      |          |

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/07/23 11:19 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

| URAIAN  | 2023             | 2022            | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)      |
|---|------------------|-----------------|------------------------|----------|
| Beban Subsidi   | 0                | 0               | 0                      |          |
| Beban Hibah   | 0                | 0               | 0                      |          |
| Beban Bantuan Sosial                                  | 0                | 0               | 0                      |          |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | 750,672,251      | 739,589,166     | 11,083,085             | 1.499    |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                 | 0                | 0               | 0                      |          |
| Beban Transfer  | 0                | 0               | 0                      |          |
| Beban Lain-Lain                                       | 0                | 0               | 0                      |          |
| JUMLAH BEBAN  | 10,194,238,780   | 9,583,181,558   | 611,057,222            | 6.376    |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL             | (10,180,917,163) | (9,578,994,706) | (601,922,457)          | 6.284    |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL                              | 0                | 0               | 0                      |          |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar             | 311,999          | 4,123,456       | (3,811,457)            | (92.434) |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                  | 311,999          | 4,123,456       | (3,811,457)            | (92.434) |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                       | 0                | 0               | 0                      |          |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0                | 0               | 0                      |          |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang      | 0                | 0               | 0                      |          |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang           | 0                | 0               | 0                      |          |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 3,621,034        | 0               | 3,621,034              |          |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya      | 3,621,034        | 0               | 3,621,034              |          |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya           | 0                | 0               | 0                      |          |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  | 3,933,033        | 4,123,456       | (190,423)              | (4.618)  |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA                | (10,176,984,130) | (9,574,871,250) | (602,112,880)          | 6.288    |
| POS LUAR BIASA  | 0                | 0               | 0                      |          |
| Beban Luar Biasa                                      | 0                | 0               | 0                      |          |
| POS LUAR BIASA  | 0                | 0               | 0                      |          |
| SURPLUS/DEFISIT - LO                                  | (10,176,984,130) | (9,574,871,250) | (602,112,880)          | 6.288    |

---

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

KUPANG, 11 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

MARCIANA D. JONE, S.H.

196411261991032001



## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 2400 ) NUSA TENGGARA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 408886 ) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/07/23 11:24 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

| URAIAN                                   | 2023             | 2022            | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|--|------------------|-----------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL                             | 71,024,980,264   | 69,324,431,983  | 1,700,548,281          | -   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                       | (10,176,984,130) | (9,574,871,250) | (602,112,880)          | -   |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 0                | 0               | 0                      | -   |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                   | 0                | 0               | 0                      | -   |
| SELISIH REVALUASI ASET                   | 0                | 0               | 0                      | -   |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI         | 0                | 0               | 0                      | -   |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                  | 9,996,778,039    | 10,558,607,581  | (561,829,542)          | -   |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS               | (180,206,091)    | 983,736,331     | (1,163,942,422)        | -   |
| EKUITAS AKHIR                            | 70,844,774,173   | 70,308,168,314  | 536,605,859            | -   |

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

KUPANG, 11 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

MARCIANA D. JONE, S.H.

196411261991032001

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 Eselon I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
 Wilayah : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR  
 Satuan Kerja : (408886) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG  
 No. Dokumen : 001  
 Tanggal : 30 Juni 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Koreksi Antar Beban

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

|    |  |   |    |   |                                  |
|----|--|---|----|---|----------------------------------|
| 1  |  | Pendapatan Diterima Di Muka               | 17 |   | Transfer Masuk                   |
| 2  |  | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima      | 18 |   | Transfer Keluar                  |
| 3  |  | Belanja Dibayar Di Muka                   | 19 |   | Koreksi Beban Aset               |
| 4  |  | Beban Yang Masih Harus Dibayar            | 20 |   | Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU |
| 5  |  | Penyisihan Piutang                        | 21 |   | Kas Lainnya di BLU               |
| 6  |  | Penghapusan Piutang                       | 22 |   | Uang Muka Belanja                |
| 7  |  | Penyusutan Aset                           | 23 |   | Perolehan Aset                   |
| 8  |  | Kas Di Bendahara Penerimaan               | 24 |   | Koreksi Piutang/utang            |
| 9  |  | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran      | 25 |   | Hibah Langsung                   |
| 10 |  | Persediaan                                | 26 |   |                                  |
| 11 |  | Koreksi Antar Beban                       | 27 |   |                                  |
| 12 |  | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi | 28 |   |                                  |
| 13 |  | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi      | 29 |   |                                  |
| 14 |  | Pembentukan Piutang Jangka Panjang        | 30 |   | Penyesuaian Neraca               |
| 15 |  | Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya         | 31 |   | Jurnal Koreksi                   |
| 16 |  | Pembentukan Piutang Jangka Pendek         | 32 | √ | Jurnal Umum                      |

| No. | D/K | Kode Akun | Uraian Nama Akun                              | Rupiah Debet  | Rupiah Kredit |
|-----|-----|-----------|---|---------------|---------------|
| 1   | D   | 521252    | Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel    | Rp 54.000.000 |               |
| 2   | K   | 595112    | Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin |               | Rp 54.000.000 |

Keterangan: Jurnal Reklasifikasi Belanja Aset EkstraKomptabel (akun 59 ke 52)

Dibuat oleh :  
Petugas Akuntansi

Disetujui oleh :  
Kepala Sub Bagian  
Pelaporan Keuangan & BMN

Direkam oleh :  
Operator GLP

HELMID IMANUEL KADJI  
NIP. 199008112010121004

SELFIANI M. NAUTANI, SH  
NIP. 198609182006042005

HELMID IMANUEL KADJI  
NIP. 19810721 200012 1 003

Tanggal : 30 Juni 2023

Tanggal : 30 Juni 2023

Tanggal : 30 Juni 2023